

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, wajib dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LPPD ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas PUPR Prov. NTT sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PUPR Provinsi NTT.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil – hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggungjawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun – tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang, Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680326 199703 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang .....	1	
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	4	
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah .....	4	
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	5	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	55	
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi .....	55	
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	55	
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....		62
4.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	62	
4.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	79	
BAB IV PENUTUP .....	86	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

**1.1.1 Penjelasan Umum** (*diisi oleh Biro Pem.....*)

**1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah** (*diisi oleh Biro Pem.....*)

**a. Permasalahan Strategis Daerah Pemerintah**

**b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

#### **➤ Visi**

Kondisi yang akan dicapai lima tahun ke depan, dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi :

**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. RPJMD 2019-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :**“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

#### ➤ **MISI**

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui Misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023 sebagai berikut:

##### **1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

##### **2. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)**

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estates* sebagai penggerak utama

(*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

**3. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

**4. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

**5. Misi 5 :Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

**1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( diisi oleh Biro Pem.....)**

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

**2.1 Capaian Kinerja Makro** (*diisi oleh Biro Pem.....*)

**2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan** (*ada pada lampiran*)

**2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

*Catatan : Pada Lampiran 2.2.1 dan lampiran 2.2.2*

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			RPJMD
2				
3				

**2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-		Dinas PUPR
2		-		
3		-		

**2.1.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			

### **2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Informasi capaian akuntabilitas pemerintah Daerah antara lain :

**a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

**Catatan : Pada Lembaran berikutnya:**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT**

Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Viktor Bungtilu Laiskodat**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Viktor Bungtilu Laiskodat**

**Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah dan Keluar Daerah	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	85,12 %	100%	$\frac{\text{(Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap (data survey kondisi jln)}}{\text{Panjang Jalan Provinsi}} \times 100\%$
		Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	66,60 %	100%	$\frac{\text{(existing+realisasi tahun n)}}{\text{Panjang Jalan Pariwisata}} \times 100\%$
		Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	96,6 %	100%	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan yang tersertifikasi ahli tahun n}}{\text{total peserta pelatihan}} \times 100\%$

2.	Tersediannya Infrastruktur Pengairan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	19,01 %	33,10%	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target Pembangunan Embung}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	57,96 %	100%	$\frac{(\text{existing kondisi baik} + \text{perawatan tahun } n)}{\text{Luas DI Provinsi}} \times 100\%$
		Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	59,35 %	100%	$\frac{\text{Jumlah kk yang mendapatkan akses Air Minum Layak}}{\text{Jumlah Target Air Minum Layak}} \times 100\%$
		Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	81,24 %	90%	$\frac{(\text{Jumlah kk yang mendapatkan akses Air Minum Layak})}{\text{Total KK di Kawasan Destinasi Wisata}} \times 100\%$
		Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	40,21 %	100%	$\frac{(\text{Total Capaian})}{\text{Total KSDP}} \times 100\%$

5.	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	36,36 %	100%	$\frac{\text{(Jumlah Penanganan)}}{\text{Total Destinasi Wisata}} \times 100\%$
		Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	77,78 %	100%	$\frac{\text{Perda yang akan di tetapkan}}{\text{Target Perda}} \times 100\%$

## B. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Uraian	Alokasi		Keterangan
1)	<b>APBD</b>			
	a) <b>Belanja (Program)</b>	Rp.	206.976.935.998	Realisasi minimal 85%
	1. Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	44.275.457.393	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp.	13.804.621.468	Realisasi minimal 90%
	3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	101.822.800	Realisasi minimal 90%
	4. Pengembangan Permukiman	Rp.	6.999.999.675	Realisasi minimal 90%
	5. Penyelenggaraan Jalan	Rp.	140.995.034.662	Realisasi minimal 90%
	6. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	800.000.000	Realisasi minimal 90%

	7.	Pengembangan Perumahan	Rp.	99.999.200	Realisasi minimal 90%
	b)	Pendapatan	Rp.	3.750.000.000	Realisasi minimal 90%
2)	APBN			Anggaran	Keterangan
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)				
	1.	Ketahanan Sumber Daya Air	Rp.	24.156.951.000	Realisasi minimal 90%
	2.	Infrastruktur Konektivitas	Rp.	7.453.920.000	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan		Rp.	31.610.871.000	Realisasi minimal 90%

C. Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing ;

D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 28 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);

F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);

G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;

H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:

1. TL temuan tahun 2022; Administrasi 100 %, Keuangan 80 %

2. TL temuan di bawah tahun 2022; Administrasi 100% Keuangan 80 %

- L. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis dan yang diusul pada pelaksanaan kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/LSM minimal 2 (dua)**
- J. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;**
- K. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- L. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif ;**
- M. Jumlah kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.**

Januari 2023

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**Viktor Bungtilu Laiskodat**

**Ir. Maksi Y. E. Nenahu, MT**

**b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi	1. Peningkatan % Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	85,12 %	100 %	73,25%	<p><b>Capaian Kondisi Mantap Jalan</b></p> <p>-----x</p> <p><b>100</b></p> <p><b>Total Panjang Jalan Provinsi</b></p> <p>Realisasi tahun 2023 : 42,155 Km Terdiri dari Luncuran : 6.545 Km DAK : 20.240 Km DAU : 15,370 Km Jenis Penanganan: HRS : 38,985 Km Go : 3,170 Km</p> <p>Sehingga Capaian di Tahun 2023 adalah  <math display="block">\frac{38,985 \text{ Km} \times 100}{2.650 \text{ Km}} = 1,48 \%</math></p> <p>Jadi Total Capaian sampai dengan tahun 2023 adalah kondisi capaian</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>tahun 2022 (85,12 % + realisasi tahun 2023 (1,60 %)) = 86,72 %</p> <p>Pada akhir tahun 2022 capaian kemantapan jalan adalah sepanjang 2.255 km (85,12%) . Secara teoritis penurunan kondisi kemantapan jalan pertahun sebesar 14 % tanpa biaya/kegiatan pemeliharaan dan 4 % dengan biaya/kegiatan pemeliharaan.</p> <p>Pada awal tahun 2023 saat asistensi data teknis usulan DAK tahun 2024 menggunakan data kondisi kemantapan jalan akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran survey kondisi kemantapan jalan akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.</p> <p>Oleh karena tidak adanya pemeliharaan jalan karena keterbatasan anggaran maka saat asistensi di sepakati kondisi</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>kemantapan jalan provinsi awal tahun 2023 sebesar 71,77 %</p> <p>Dengan demikian kondisi mantap jalan pada akhir tahun 2023/ awal tahun 2024 menjadi 71,77 %</p> <p>Maka capaian kondisi mantap sampai akhir tahun 2023 sebesar <math>71,77\% + 1,48\% = 73,25\%</math></p> <p>Untuk memperoleh data kondisi kemantapan jalan sampai dengan akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 sedang di olah data hasil survey kondisi tahun 2023.</p>
		2. Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	66,60 %	100 %	68,04 %	<p><b><i>Total Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi di Destinasi Wisata</i></b></p> <p>-----</p> <p><b><i>x100</i></b></p> <p><b><i>Total Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang Terhubung ke Destinasi Wisata</i></b></p>



N O ·	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOND ISI	TAR GET	REALI SASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Realisasi tahun 2023 : 7,85 Km</p> <p><math>\frac{7,85 \text{ Km}}{542,87} \times 100 = 1,44\%</math></p> <p>Jadi total capaian sampai dengan tahun 2023 adalah : kondisi capaian tahun 2022 : 361,53 Km (66,60%) + 7,85 Km (1,44 %) = 369,38 Km (68,04 %)</p> <p>Sehingga capaian Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi di Destinasi Wisata sampai dengan tahun 2023 adalah 361,53 Km atau 68,04 %</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Nusa Tenggara Timur	3. Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi	96,6 %	100 %	97,78 %	<p><b><i>Jumlah Tenaga Konstruksi yang Tersertifikasi Ahli Tahun n</i></b></p> <p>-----</p> <p><b><i>x100</i></b></p> <p><b><i>Jumlah Tenaga Konstruksi yang Mengikuti Sertifikasi Tahun n</i></b></p> <p>Realisasi Tahun 2023 :</p> <p><math>\frac{88 \text{ Peserta}}{90 \text{ Peserta}} \times 100 = 97,78 \%</math></p> <p>Sehingga Capaian pada tahun 2023 adalah 97,78 %</p>
	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi	4. Peningkatan Persentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun	19,01 %	33,10 %	23,94 %	<p><b><i>Jumlah Embung Terbangun Tahun n</i></b></p> <p>-----</p> <p><b><i>x100</i></b></p> <p><b><i>Target Embung dibangun Selama 5 Tahun</i></b></p> <p>Kondisi embung terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 27 embung (26</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>embung + 1 embung (konversi dari sumur bor))</p> <p>Realiasi Tahun 2023 : 3 buah embung (paket luncuran yang sudah terhitung di tahun 2021)</p> <p><i>Catatan Penting Sumur Bor:</i></p> <p>Pada tahun 2023 terdapat paket luncuran pembangunan 9 Sumur Bor, dan paket DAU murni 17 unit, terealisasi 16 unit dan (1) satu paket di anggarkan kembali di tahun 2024.</p> <p>Total sumur bor yang terbangun sampai 2023 adalah <math>9+16=25</math> Sumur Bor, equivalen <math>25/6 = 4 = 4</math> embung kecil,</p> <p>Realisasi 2023 = <math>3+4=7</math> Embung</p> <p>Capaian s/d 2023 = <math>\frac{7+27}{142} \times 100 = 23,94 \%</math></p> <p>(kapasitas tampungan 6 sumur bor sama seperti kapasitas tampung 1 embung,)</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
		5. Peningkatan Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	57,96 %	100%	58,26 %	<p>Luasan areal irigasi yang sudah terlayani jaringan irigasi pada tahun berjalan di tambah tahun sebelumnya</p> $\frac{\text{Luasan areal irigasi yang sudah terlayani jaringan irigasi pada tahun berjalan di tambah tahun sebelumnya}}{\text{Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi}} \times 100$ <p>42 DI Luas 60.328 Ha</p> <p>Kondisi Tahun 2022 : 34.963,58 Ha</p> <p>Penanganan tahun 2023 : 183,89 Ha</p> <p>Sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 adalah 35.147,47 Ha</p> $\frac{35.147 \text{ ha}}{60.328 \text{ ha}} \times 100 = 58.26 \%$
		6. Peningkatan persentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	59,09 %	100 %	77,27 %	<p><b><i>Jumlah Sungai pada WS kewenangan provinsi yang sudah diintervensi</i></b></p> $\frac{\text{Jumlah Sungai pada WS kewenangan provinsi yang sudah diintervensi}}{22 \text{ Sungai pada WS kewenangan Provinsi}} \times 100$ <p>Realisasi Tahun 2023 : 1 Sungai (Neusin TTS)</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Data existing 2019 : 4 sungai Tahun 2020 : 6 Sungai Tahun 2021 : 6 Sungai Tahun 2022 : -</p> <p>Sehingga sungai pada WS kewenangan provinsi yang sudah diintervensi sampai dengan tahun 2023 adalah 14 Sungai  <math>\frac{17 \text{ Sungai}}{22 \text{ Sungai}} \times 100 = 77,27 \%</math></p>
	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	7. Peningkatan persentase KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	59,35 %	100 %	76,76 %	<p><b><i>Jumlah KK yang Mampu Mengakses Air Minum Layak Tingkat Provinsi</i></b></p> <p>-----</p> <p><b><i>x100</i></b></p> <p><b><i>Jumlah KK dalam wilayah yang terintervensi tingkat Provinsi Selama 5 Tahun</i></b></p> <p>Realiasi Tahun 2023 : 1273 KK</p> <p><math>\frac{1.273 \text{ kk}}{20.439 \text{ kk}} \times 100 = 13 \%</math></p> <p>Kondisi capaian sampai tahun 2022</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>terjadi penyesuaian Kembali dengan data KK dari Dukcapil, dan penyesuaian Kembali data DED jaringan SPAM tahun 2022 yang belum terdata maksimal. Maka setelah dilakukan penyesuaian Kembali, kondisi capaian sampai dengan 2022 yang sebelumnya 11.726 kk menjadi 14.416 kk.</p> <p>Sehingga capaian sampai dengan 2023 :</p> <p>14.416 kk + 1273 kk = 15.689 kk</p> <p><math>\frac{15689 \text{ kk}}{20.439 \text{ kk}} \times 100 = 76.76 \%</math></p>
		8. Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	40,21 %	100 %	49,48 %	<p><b>Jumlah Infrastruktur dasar yang terbangun pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi tahun n</b></p> <p>-----x100</p> <p><b>Total Target Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pada 5 Tahun Pengukuran</b></p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Realisasi Tahun 2023 : 1 (kualin TTS) + 7 (Akumulasi sampai 2019-2020 yang belum tercover)</p> <p><math>\frac{8 \text{ Kawasan}}{97 \text{ Kawasan (SPAM)}} \times 100 = 8,25 \%</math></p> <p>Sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 : <math>40,21 \%</math> (39 Kawasan) + <math>8,25 \%</math> (8 Kawasan) = <math>48,46 \%</math> (47 Kawasan)</p> <p>Tambah blud 1 kawasan 2023 (penfui timur) jadi 48 kawasan</p> <p><math>48/97 \times 100 = 49,48</math></p> <p>2019 : 6 SPAM  2020 : 1  2021 : 5  2022 : 34  2023: 1 (Ck TTS) + 1 (Blud Penfui Timur)</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	9. Peningkatan Persentase wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	77,78 %	100 %	100 %	<p><b>Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun n</b></p> <p><b>-----x100</b></p> <p><b>Jumlah total target RTRW dan RDTR Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi NTT pada 5 Tahun Pengukuran</b></p> <p>Realisasi tahun 2023 :</p> <p><u>23 dokumen RTRW Prov/Kab/Kota x 100</u></p> <p>23 Dokumen RTRW Prov/Kab/Kota</p> <p>=100 %</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda + 1 Provinsi</li> <li>2. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-</li> </ol>




N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya</p> <p>3. Saat ini semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten/Kota dan rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya</p> <p>4. Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 – 2023, sebanyak 7 Kabupaten telah sampai pada Penetapan Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah</p>

N O .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KON D I S I	TAR G E T	REALI SASI	FORMULA INDIKATOR/KETERANGAN
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
						Kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Ende dan Lembata

Dalam mengukur capaian kinerja sesuai Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2023 dapat kami sampaikan bahwa tidak semua indikator kinerja dapat terlaksana oleh karena minimnya ketersediaan anggaran sehingga harus mengalami 3 (tiga) kali pergeseran dan 1 (satu) kali perubahan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas pendukung pembangunan infrastruktur. Analisa capaian indikator kinerja dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023.

### c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**  
Jabatan : **GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

16 November 2022

  
Pihak Kedua

  
Pihak Pertama

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**      **Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**

**LAMPIRAN:**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah dan Keluar Daerah	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	85,73 %	100	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Panjang Jalan Provinsi}} \times 100 \%$
		Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	91,75 %	100	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Panjang Jalan Pariwisata}} \times 100 \%$
		Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	-	84	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target Jasa konstruksi}} \times 100 \%$
2.	Tersediannya Infrastruktur Pengairan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	33.50 %	33.10	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target Pembangunan Embung}} \times 100 \%$

		Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	16.2 %	66.90	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target pemeliharaan embung}} \times 100 \%$
		Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	50.71 %	64.42	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target pemeliharaan irigasi}} \times 100 \%$
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	82 %	85	Data BPS
		Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	84.28 %	80	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target destinasi wisata}} \times 100 \%$
		Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	-	70	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi}} \times 100 \%$
		Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	42.85 %	63.64	$\frac{(\text{existing} + \text{realisasi tahun } n)}{\text{Target Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi di Kawasan Destinasi Wisata}} \times 100 \%$

		Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	69.7 % 15.54 %	80 78	Data BPS (existing+realisasi tahun n) ----- x 100 % Target Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman
5.	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	70 %	42.2	(existing+realisasi tahun n) ----- x 100 % Target Perda
6.	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan Negara	Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	42.4 %	14.3	(existing+realisasi tahun n) ----- x 100 % Target Penurunan Cakupan

#### B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Anggaran		Keterangan
1)	<b>APBD</b>			
	<b>a) Belanja (Program)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.076.052.762.663</b>	Realisasi minimal 85%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	49.066.677.482	Realisasi minimal 90%
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp.	55.375.526.523	Realisasi minimal 85%
3.	Pengembangan Permukiman	Rp.	70.005.925.108	Realisasi minimal 85%
4.	Penyelenggaraan Jalan	Rp.	899.965.086.150	Realisasi minimal 85%
5.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	61.150.950	Realisasi minimal 85%
6.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.578.396.450	Realisasi minimal 85%

7.	Kawasan Permukiman	Rp.	199.971.963	Realisasi minimal 85%
	<b>b) Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.881.566.463</b>	Realisasi minimal 90%
2)	<b>APBN</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
	<b>Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)</b>			
1.	Ketahanan Sumber Daya Air	<b>Rp.</b>	29.404.162.000	Realisasi minimal 90%
2.	Infrastruktur Konektivitas	<b>Rp.</b>	5.846.945.000	Realisasi minimal 90%
	<b>Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.251.107.000</b>	Realisasi minimal 90%

- C. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);
- F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);
- G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;
- H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
  - 1. TL temuan di bawah tahun 2020; Administrasi 100 %, Non Administrasi minimal 75 %
  - 2. TL temuan di atas tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100 %
- I. Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001: 2015;

- J. Jumlah Inovasi Minimal 5 (lima) jenis;
- K. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-NADI paling lambat Tanggal 1 Maret 2022;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75);
- N. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

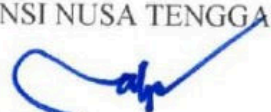
W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



W VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

16 November 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2022



## A. Analisa Capaian Indikator Kinerja Organisasi

### 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian kinerja. Adapun skala pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Pengukuran Skala Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$85 \% \leq X$	Sangat Berhasil	Hijau Tua
2.	$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil	Hijau Muda
3.	$55 \% \leq X < 70 \%$	Cukup Berhasil	Kuning Tua
4.	$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil	Merah

### 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh satu organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang antara lain dijabarkan dalam bentuk perjanjian kinerja organisasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas. Sejalan dengan hal ini maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran ringkas tentang capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 sesuai program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas. Sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis dengan membandingkan capain tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya demikian juga gambaran target kinerja

dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023.

### 3.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja sesuai indikator kinerja dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur dan tertuang dalam Rencana Strategis yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1  
Sasaran Strategis dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	REALISASI	
			PELAKSANAAN 2023	
			TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi	Peningkatan % Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	100 2.650 km	1,48% 38,985 km
		Presentase Penyediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100 % 542,87 km	1,44 % 7,85 km
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Peningkatan Presentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun	33,50% 48 Unit	14,58% 7 Unit
		Peningkatan Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	100 %	0,30 % 183,89 Ha
		Peningkatan Presentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	100% 22 sungai	4,55% 1 sungai
3	Meningkatnya Akses	Peningkatan Presentase Kepala	100%	6,23%

	Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	Keluarga (KK) yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	4.438 KK	1.273 KK
		Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang di tangani setiap Tahun	97 Kawasan	2,07% 2 Kawasan
4	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Nusa Tenggara Timur	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi	100% 90 Peserta	97,78% 88 Peserta
5	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan Persentase wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	100% 23 dokumen	100% 23 dokumen

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2023.

### 3.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

**3.1.1** Secara umum untuk Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja penyelenggaraan Jangka Menengah yang sesuai indikator kinerja RPJMD dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur terhadap Indikator Kinerja Kunci yang digambarkan di tabel berikut :

Tabel III.2  
Indikator Capaian Kinerja Kunci Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	REALISASI PELAKSANAAN 2023	
			TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi	Peningkatan % Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	100 2.650 km	1,48% 38,985 km
		Presentase Penyediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100 542,87 km	1,44% 7,85 km
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Peningkatan Presentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun	33,50% 48 Unit	14,58% 7 Unit
		Peningkatan Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	100 %	0,30 % 183,89 Ha
		Peningkatan Presentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	100% 22 sungai	4,55% 1 sungai
3	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	Peningkatan Presentase Kepala Keluarga (KK) yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	100 % 4.438 KK	6,23% 1.273 KK
		Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan	100% 97Kawasan	2,07% 2 Kawasan

		Strategis Daerah Provinsi yang di tangani setiap Tahun		
4	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Nusa Tenggara Timur	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi	100% 90 Peserta	97,78% 88 Peserta
5	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan Persentase wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	100% 23 dokumen	100% 23 dokumen

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2023.

### 3.3 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2023 , Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan Indikator Kinerja Kunci, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang wujud pelaksanaannya dalam 9 indikator kinerja di Tahun 2023 yaitu :

#### 3.3.1 SASARAN STRATEGIS 1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja “**Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi**” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel

III.3 :

Tabel III.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	“Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi”					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Peningkatan % Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	100% 2.650 km	17,81% 472.037 km	85,12% 2.255.818 km	100% 2.650 km	1,48% 38,985 km	73,25%  1.941,125 km ( data survei kondisi mantap jalan)
Presentase Penyediaan jalandan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100% 542,87 km	29,27% 158,94 km	66,60% 361,53 km	100% 542,87 km	1,44% 7,85 km	68,04% 369,38 km

Realisasi pencapaian Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi” dengan ukuran indikator :

1. *Peningkatan % Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap adalah sbb:*

Kondisi mantap jalan pada tahun 2022 telah mencapai 2.255,818 km atau 85,12%. Capaian kondisi ini diperoleh dari akumulasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan hingga tahun 2022. Penetapan kondisi mantap jalan seyogyanya harus berdasarkan data survei kondisi jalan yang biasanya dilakukan pada akhir tahun berjalan, namun pelaksanaan survei kondisi tahun 2022 mengalami kendala sehingga tidak dapat dilakukan.

Pada Tahun 2023 Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penanganan terhadap seluruh ruas jalan yang masih berada dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat lebih kurang sepanjang 394,182km sehingga kondisi mantap jalan dapat mencapai 100%. Namun dalam tahapan perencanaan dan penganggaran tahun 2023 mengalami perubahan dan target yang ditetapkan untuk diakomodir pelaksanaannya adalah 50,030 km yang terdiri dari : Paket Luncuran sepanjang 14,420 km; Paket DAK sepanjang 20,240 km dan Paket DAU sepanjang 15,370 km.

Melalui semua upaya maksimal yang dilakukan di tahun 2023 maka realisasi capaian dari target ini adalah sepanjang 38.985 km terdiri dari sumber dana : DAK sepanjang 20.240 km, DAU sepanjang 12,200 km dan Paket Luncuran sepanjang 6,545 km dengan konstruksi seluruhnya HRS.

---

---

Jadi Total Capaian dari aspek penanganan sampai dengan tahun 2023 = kondisi capaian tahun 2022 (85,12 %) + realisasi tahun 2023 (1,48 %) = 86,60 %.

Target penanganan tahun 2023 sepanjang 50,030 km, tidak dapat tercapai seluruhnya oleh karena penanganan ruas jalan Kapan – Bts. Kab.TTU (Paket Luncuran) tidak selesai dikerjakan. Dari total panjang 11 km, hanya bisa terselesaikan sepanjang 3,125 km dan masih tersisa 7,875 km yang tidak selesai dikerjakan di tahun 2023.

Terkait kondisi mantap jalan dapat disampaikan bahwa secara teoritis kondisi mantap jalan dapat mengalami penurunan jika tidak dilakukan upaya pemeliharaan setiap tahunnya dengan tingkat penurunan pertahun dengan ekspektasi sebesar 14% dan sebaliknya jika dilakukan pemeliharaan masih dapat terjadi penurunan akibat pemanfaatan jalan dengan yang diperkirakan sebesar 4 %.

Pada awal tahun 2023 dilakukan asistensi data teknis untuk usulan DAK tahun 2024 maka data kondisi yang dipakai sebagai acuan adalah data kondisi kemantapan jalan akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Data kondisi mantap akhir tahun 2022 tidak dapat dipakai sebagai dasar acuan untuk usulan DAK oleh karena data ini bukan merupakan data hasil survei kondisi, dimana pada tahun 2022 survei ini tidak dapat dilakukan berkaitan dengan keterbatasan anggaran.

Berdasarkan hasil asistensi untuk usulan DAK ini maka kondisi kemantapan jalan provinsi awal tahun 2023 ditetapkan sebesar 71,77 %.

Secara akumulatif berdasarkan capaian penanganan tahun 2024 dan data kondisi mantap awal tahun 2023 maka **capaian kondisi mantap jalan sampai akhir tahun 2023** adalah sebesar 71,77% + 1,48 % = **73,25 % atau 1.941,125 km.**

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, kondisi mantap jalan ini mengalami penurunan oleh karena terdapat beberapa ruas jalan yang berada pada lokasi daerah tebing sehingga rawan terjadinya longsor dan tidak dilakukannya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan terhadap ruas-ruas jalan yang telah dibangun sebelumnya. Sangat diharapkan agar upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan untuk dilakukan dengan dukungan anggaran yang memadai setiap tahunnya.

## *2. Presentase Penyediaan jalandan jembatan ke 22 Pariwisata Estate adalah sbb:*

Total panjang ruas jalan kewenangan provinsi untuk membuka akses jalan penunjang ke 22 destinasi wisata adalah 542,87 km dan sampai dengan tahun 2022 panjang jalan penunjang destinasi wisata yang sudah tertangani adalah 361,53 km atau 66,60 %.

Rencana penanganan atau target Tahun 2023 terhadap ruas jalan pendukung destinasi wisata adalah 181,34 km yang dilakukan untuk mencapai target 100% penanganan seluruh ruas jalan menuju

---

destinasi wisata. Realisasi penanganannya di Tahun 2023 adalah 7,85 km atau 1,44 % terhadap target. Akumulasi capaian sampai dengan 2023 adalah sebesar 361,53 Km + 7,85 km = **369,38 km atau 68,04 %**.

Ruas jalan menuju destinasi wisata yang dikerjakan tahun 2023 adalah :

1. Ruas jalan Soe – Kapan sepanjang 2 Km (HRS)
2. Ruas jalan Melolo – Kananggar sepanjang 5,85 km (HRS)

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target 100% mantap jalan antara lain disebabkan karena :

- a) Kondisi mantap jalan berdasarkan survey kondisi jalan tahun 2023, mengalami penurunan oleh karena tidak adanya kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan yang harusnya dilakukan setiap tahunnya
- b) Adanya Kenaikan BBM dan Aspal yang mempengaruhi kemampuan keuangan penyedia jasa dalam penyelesaian pekerjaan di Lapangan
- c) Ruas jalan provinsi Sebagian besar berada pada wilayah perbukitan yg hampir setiap tahun terjadi Curah hujan yang tinggi, longsor, dll
- d) Terjadinya peningkatan volume lalu lintas serta bertambahnya kendaraan bertonase tinggi menyebabkan over load yang diterima jalan
- e) Masalah keuangan (Cash Flow)

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- a) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan sebagai langkah antisipatif upaya penyelesaian pada tahun berikutnya.
- b) Melakukan pemutusan Hubungan Kerja pada Penyedia yang dinilai tidak dapat melanjutkan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- c) Mengusulkan penganggaran kembali paket-paket yang belum selesai dikerjakan ke Tahun anggaran berikutnya.
- d) Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait serta mengambil Langkah antisipatif dan penanganan yang sesuai guna meminimalisir terjadinya keterlambatan dan kegagalan konstruksi
- e) Mempercepat pembangunan Jalan kewenangan Provinsi
- f) Menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan lahan disekitar jalan untuk kegiatan penambangan dan bercocok tanam pada daerah tebing lereng tanpa ijin



---

---

Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2023 untuk menjawab capaian indikator *Peningkatan Presentase Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap*, melalui Program Penyelenggaraan Jalan antara lain :

1) Program Penyelenggaraan Jalan

a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

i) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan :

- (1) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa -Batutua ( DAK )
- (2) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Barate – Manubelon – Naikliu ( DAK )
- (3) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts.Kab) – Wini Sakato (Bts.Negara) ( DAK )
- (4) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan – Keliting (Bts. Kab TTU) ( DAK )
- (5) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Melolo – Kenangar (DAK)
- (6) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oemoro – Oekabiti (DAK)
- (7) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oesao – Buraen ( DAK )
- (8) Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Noa – Golo Welu (Bts.Kab) ( DAK )
- (9) Peningkatan Ruas Jalan Ruas Jalan Kondo - Sp. Noa – Hita ( DAU SG)
- (10) Peningkatan Jalan Kondo – Sp. Noa – Hita (6,94 km) (DAK Penugasan)

ii) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan : DAU-Spesifik Grand

- (1) Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua – Weluli 0,170 km
- (2) Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring – Wairiang 2,100 km
- (3) Rehabilitasi Ruas Jalan Hita – Sp. Tiga – Kedindi 1,900 km
- (4) Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang – Tablolong 1,300 km
- (5) Rehabilitasi Ruas Jalan Soe – Kapan, CS 2,700 km
- (6) Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik,CS 0,650 km
- (7) Rehabilitasi Ruas Jalan Kapan – Bts. Kab TTU (Pinjaman Daerah – PT. SMI)
- (8) Rehabilitasi Ruas Jalan Malahar – Sp. Tarimbang – Praipaha (Pinjaman Daerah – PT. SMI)
- (9) Rehabilitasi Ruas Jalan Naikliu – Oepoli (Bts.Negara) (Pinjaman Daerah – PT. SMI)
- (10) Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah – PT. SMI)
- (11) Rehabilitasi Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben (Pinjaman Daerah – PT. SMI)
- (12) Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2, CS di Kab. Nagekeo (DAU SG)

### 3.3.2 SASARAN STRATEGIS 2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 2 : **Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi**, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III.4

Tabel III.4  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi					
	2022			2023		
Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Presentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun	33,10 % 47 Embung	48,93 % 23 Embung	19,01 % 27 Embung	33,80% 48 Embung	14,58% 7 Embung	23,94% 34 Embung
Peningkatan Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	64,42 % 38.863 Ha	1,79% 695,50 Ha	57,96% 34.963,58 Ha	100% 60.328 Ha	0,30 % 183,89 Ha	58,26 % 35.147,47 Ha
Peningkatan Presentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	0	0	0	100% 22 sungai	4,55% 1 sungai	77,27% 17 sungai

Realisasi pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi, dapat terukur dengan beberapa indikator kinerja yaitu :

1. *Peningkatan Presentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun.*

---

Sampai dengan Tahun 2022 total capaian pembangunan embung yang sudah terbangun adalah sebanyak 27 unit (26 embung + 1 embung (konversi dari sumur bor) atau 19,01% dari target 142 buah.

Rumusan perhitungan capaiannya adalah *Jumlah Embung terbangun Tahun n di bagi Target embung dibangun selama 5 tahun kali 100%*.

Target pelaksanaan pembangunan embung tahun 2023 sesuai Rencana Strategis Dinas adalah 33,80% sebesar 48 Unit. Capaian Realisasi pelaksanaannya adalah sebanyak 7 unit yang terdiri dari 3 unit paket luncuran dari tahun 2022 yang berada di wilayah Kabupaten TTS dan 4 unit embung hasil konversi dari pembangunan sumur bor.

Pada tahun 2023 terdapat paket luncuran pembangunan 9 Sumur Bor, dan paket DAU murni 2023 sebanyak 17 Sumur Bor. Dari 17 paket Sumur Bor tahun 2023 terdapat (1) satu paket yang tidak selesai dikerjakan dan dianggarkan kembali untuk penyelesaiannya di Tahun 2024. Sehingga realisasi di tahun 2023 dapat terbangun sebanyak 25 Sumur Bor.

Terkait Indikator *Peningkatan Presentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun* dapat disampaikan bahwa pembangunan sumur bor sebagai bangunan penampung air lainnya yang dibangun tahun 2023 dikonversikan menjadi bangunan embung dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

*Perhitungan Debit Sumur Bor :*

- Asumsi Debit Sumur Bor = 4,2 m<sup>3</sup> / jam
- Total jam operasi per hari = 8 jam; Total Debit per hari = 8 jam x 4,2 m<sup>3</sup> = 33,6 m<sup>3</sup> / hari
- Debit per bulan = 33,6 m<sup>3</sup> x 30 hari = 1.008 m<sup>3</sup> / bulan
- Debit setahun dihitung maksimal pada bulan basah (musim hujan) yaitu 4 bulan = 4 x 1.008 m<sup>3</sup> = 4.032 m<sup>3</sup> / tahun

*Perhitungan kapasitas Embung :*

- Tampung rata-rata 1 buah embung = 25.000 m<sup>3</sup>
- Konversi terhadap sumur bor = 25.000 m<sup>3</sup> / 4.032 m<sup>3</sup> = 6,20 ~ 6 titik sumur bor

Total pembangunan sumur bor tahun 2023 adalah sebanyak 25 buah. Jika dikonversikan terhadap capaian pembangunan embung dengan perhitungan 1 buah embung sama dengan 6 buah sumur bor maka total embung hasil konversi dari pembangunan sumur bor tahun 2023 adalah  $25 / 6 = 4,16 \sim 4$  buah embung. Total Capain tahun 2023 menjadi 7 buah embung.

**Dengan demikian akumulasi capaian Pembangunan Embung sampai dengan Tahun 2023 adalah 34 Unit atau 23,94%.**

Kendala pencapaian realisasi masih berkaitan keterbatasan kondisi fiskal daerah dalam mendukung

---

pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Sebagai solusi kondisi ini diharapkan akan mendapat perhatian ke depan agar penetapan target pembangunan dan ketersediaan anggaran dapat berjalan selaras menuju pencapaian kinerja yang diharapkan.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Peningkatan Presentase Embung dan Bangunan Penampung Air yang terbangun*, telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sikka (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Manggarai Barat (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Manggarai Barat (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi C di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi D di Kab. Manggarai Timur (Tahun 2022)
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Belu
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Flores Timur
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Manggarai Barat
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Nagekeo
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang
    - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur

- 
- 
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Timur
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang
  - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur

## 2. Peningkatan Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan *Rumusan perhitungan formula Indikator Kinerja Utama = Luas Areal Irigasi yang sudah terlayani Jaringan Irigasi pada tahun berjalan di tambah tahun sebelum di bagi Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi kali 100%*.

Untuk menjaga dan meningkatkan fungsi layanan saluran irigasi secara optimal berdasarkan klasifikasi maka penanganan saluran irigasi terbagi ke dalam 4 klasifikasi yaitu Irigasi Primer, Irigasi Sekunder, Irigasi Tersier dan Irigasi Kwartier.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka kewenangan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah pada Irigasi Primer dan Sekunder.

Pada Tahun 2022 target capaian pelaksanaan Pemeliharaan Saluran Irigasi adalah 64,42% (38.863,30 Ha) dengan realisasi Penanganan rehabilitasi jaringan irigasi pada 5 (lima) Daerah Irigasi melalui Dana DAK dengan realisasi sebesar 1,79% (695,50 Ha). Akumulasi Capaian terhadap indikator ini sampai dengan Tahun 2022 adalah 34.963,58 Ha atau 57,96% di 24 D.I terhadap total luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi.

Di Tahun 2023 target pelaksanaan diharapkan dapat menangani pemeliharaan irigasi adalah 100% (60.328 Ha). Realisasi yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tahun 2023 melalui kegiatan pemeliharaan berkala pada jaringan irigasi pada 3 D.I adalah 183,89 Ha atau sebesar 0,30% terhadap total luas D.I atau total pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2023 adalah 34.963,58 Ha + 198,89 Ha = 35.147,47 Ha.

**Akumulasi capaian indikator ini sampai dengan Tahun 2023 menjadi 35.147,47 / 60.328 Ha = 58,26 %.**

---

Dalam tahun 2023 selain dilakukan kegiatan pemeliharaan berkala pada daerah irigasi, telah dilakukan juga pemeliharaan rutin pada 18 daerah irigasi kewenangan provinsi. Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan untuk setiap D.I. kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang berpengaruh terhadap luasan Fungsional secara keseluruhan. Pemeliharaan rutin pada daerah irigasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan fungsi penunjang terhadap optimalisasi pemanfaatan layanan irigasi. Realisasi capaian melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin yang dilakukan oleh Bidang OP SDA & Irigasi di Tahun 2023 sebanyak 18 D.I. yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota dengan total Luas Pengaruh terhadap Luas Fungsional sebesar **8.980 Ha**.

Capaian pelaksanaan kegiatan baik melalui pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin yang dilakukan dalam tahun 2023 ini masih jauh dari apa yg diharapkan terhadap upaya untuk mencapai kondisi kinerja pelayanan jaringan irigasi yang optimal dan dalam kondisi baik (< 70%) dari semua DI Kewenangan Provinsi.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum Optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi dengan kondisi baik < 70 %, dimana masih ada kerusakan jaringan irigasi akibat umur konstruksi;
- Bencana alam, dan kurangnya operasi dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang ada.

Solusi yang diharapkan adalah :

- Adanya peningkatan alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi guna meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang sudah terbangun.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Peningkatan Presentase Pemeliharaan Saluran Irigasi* telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukiman
    - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Wanokaka (2.635 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)
  - b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman
    - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Cancar di Kab. Manggarai
    - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Wanokaka di Kab. Sumba Barat
    - ✓ Pemeliharaan Berkala D.I Weliman di Kab. Malaka
    - ✓ Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu
    - ✓ Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang

- 
- 
- ✓ Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai Barat
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. Flores Timur
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. Manggarai Timur
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. Nagekeo
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. Ngada
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Barat
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Barat Daya
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. TTS
  - ✓ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kab. TTU

### 3. *Peningkatan Presentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai*

Bangunan perlindungan tebing sungai (Revetment) berfungsi sebagai perkuatan lereng atau tebing, guna melindungi suatu tebing terhadap gerusan arus sungai. Pemeliharaan bangunan perkuatan tebing merupakan hal yang penting untuk untuk mencegah terjadinya kerusakan konstruksi bangunan yang berada di sekitar atau sepanjang bantaran sungai yaitu 22 sungai kewenangan provinsi.

Kegiatan ini dalam Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan oleh karena keterbatasan anggaran. Di Tahun 2023 target capaian adalah 100 % (22 buah sungai) dan realisasi dalam pelaksanaannya hanya 1 (satu) buah sungai (Sungai Meusin di Kabupaten TTS) yang dapat ditangani atau nilai presentase capaiannya sebesar 4,55%. **Sehingga sampai dengan tahun 2023 jumlah sungai pada wilayah sungai kewenangan provinsi yang sudah di intervensi adalah sebanyak 17 sungai atau 77,27 %.**

*Rumusan perhitungan formula indikator kinerja utama adalah jumlah sungai pada wilayah sungai kewenangan provinsi yang sudah diintervensi di bagi 22 sungai pada Wilayah Sungai kewenangan Provinsi kali 100%.*

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Peningkatan Presentase Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai* telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Meusin di Boking Kabupaten TTS.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

Solusi yang diharapkan adalah :

### 3.3.3 SASARAN STRATEGIS 3

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 3 : **Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak**, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III.5

Tabel III.5  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Presentase Kepala Keluarga (KK) yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	85% 16.793 KK	69,82% 11.726 KK mengalami perubahan → 10.522 KK	59,35% 11.726 KK (mengalami perubahan) → 14.416 KK	100% 20.439 KK	6,23% 1.273 KK	76,76% 15.689 KK
Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Startegis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	70% 67 Kawasan	50,74% 34 Kawasan	40,21% 39 Kawasan	100% 97 Kawasan	2,07% 2 Kawasan	49,48% 48 Kawasan

Realisasi pencapaian Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak, dapat terukur dengan beberapa indikator kinerja yaitu:

1) *Peningkatan Presentase Kepala Keluarga (KK) yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi*

Target capaian Tahun 2023 adalah 100% pada Wilayah yang diintervensi oleh pelaksanaan kegiatan



---

yang mendukung layanan akses air minum layak sesuai target RPJMD.

*Formula pengukuran indikator kinerja ini adalah = Jumlah KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat provinsi tahun n di bagi Jumlah KK dalam wilayah yang diintervensi tingkat Provinsi selama 5 tahun X 100%.*

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2023 melalui penyediaan alat penyulingan air laut menjadi air tawar dan layanan air minum curah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat dapat dicapai layanan untuk 1.273 KK. Jika dihitung terhadap jumlah KK yang berada pada wilayah yang diintervensi tahun 2023 (1.921 KK) maka prosentase capaiannya adalah  $= 1.273 / 1.921 \times 100 = 66,27\%$  sedangkan jika di hitung sesuai realisasi target di Tahun 2023 adalah  $1.273 / 20.439 \times 100 = 6,23\%$

Pada tahun 2022, capaian indikator ini adalah **11.726 KK atau sebesar 59,35% dari jumlah total 19.757 KK.** Tetapi data capaian ini mengalami perubahan setelah dilakukan penyesuaian dengan data DukCapil dan juga berdasarkan hasil pendataan untuk penyusunan DED jaringan SPAM tahun 2022 yang semuanya dilakukan pada tahun 2020 – 2021 sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tahun 2022 ternyata sudah ada intervensi dari sumber pendanaan lainnya tetapi tidak terdata secara baik sesuai kondisi dalam tahun 2022. Dengan demikian maka data capaian tahun 2022 disesuaikan kembali dengan rincian sebagai berikut :

- Total KK di wilayah yang diintervensi kegiatan, semula = 19.757, berubah menjadi 18.518 KK pada tahun 2022
- Realisasi capaian tahun 2022 semula = 11.726
- Capaian sampai dengan tahun 2022 semula = 11.726 KK, berubah menjadi 14.416 KK
- Jumlah KK dalam wilayah yang menjadi sasaran kegiatan tahun 2023 adalah 1.921 KK, sehingga total seluruh KK dalam Wilayah yang menjadi sasaran intervensi kegiatan adalah 20.439 KK
- Target capaian tahun 2023 sebesar 100% = 20.439 KK

**Berdasarkan data capaian tersebut diatas maka akumulasi capaian sampai dengan tahun 2023 = 1.547 KK + 14.416 KK (Capaian sampai dengan tahun 2022) = 15.689 / 20.439 x 100 = 76,76%**

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk menjawab capaian indikator *Peningkatan Presentase Kepala Keluarga (KK) yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi*, telah dilaksanakan melalui : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten dan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi

---

---

dan Teknis SPAM : Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang dan Desa Toineke Kab. TTS.

Permasalahan yang dihadapi adalah

- adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak semua target dapat tercapai.
- Adanya perubahan data oleh karena melakukan penyesuaian kembali dengan data DukCapil sehingga berpengaruh terhadap data kebutuhan pelaksanaan kegiatan

Solusi yang diharapkan adalah : Mencari alternatif penganggaran serta dapat dilakukan reuiu APIP dan dianggarkan kembali TA 2024.

2) *Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Startegis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun*

*Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Infrastruktur dasar yang terbangun pada permukiman di Kawasan Strategis daerah Provinsi Tahun n di bagi Total Target Pembangunan Infrastruktur dasar pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi pada 5 tahun pengukuran X 100%.*

Tahun 2023 target capaian tahunan adalah 100% atau sama dengan 97 Kawasan. Realisasi target capaian tahunan berdasarkan penganggaran pelaksanaannya adalah 2,07% atau sama dengan 2 Kawasan. **Sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 adalah 48 Kawasan Strategis Daerah Provinsi atau 49,48%.**

Asumsi perhitungan indikator ini adalah bahwa satu Kawasan Strategis bisa membutuhkan lebih dari satu layanan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah infrastruktur dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Air minum, pelayanan sanitasi, layanan persampahan, dan drainase. Berdasarkan gambaran ini maka bilangan pembagi terhadap capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah Kawasan yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud. Kendala pencapaian realisasi Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak adalah :

- item kegiatan dengan sumber dana Spesifik Grand (SG) hampir terserap seluruhnya, sedangkan item kegiatan dengan sumber DAU Murni tidak ada yang terserap karena tidak tersedia anggaran
- terdapat paket kegiatan Spesific Grand (SG) yang perencanaan dan pelaksanaan fisik - pengawasannya dalam 1 tahun anggaran (TA), sehingga ada paket kegiatan yang tidak selesai
- terdapat paket kegiatan yang diberikan kepada Dinas PUPR untuk dilaksanakan terkait kedatangan Presiden (DAU Murni), paket kegiatan ada yang sudah selesai dan ada yang sedang

- dilaksanakan, tetapi saat pengajuan 100% dan uang muka disampaikan tidak ada anggaran
- terdapat paket kegiatan pinjaman PT SMI, yang dianggarkan kembali TA 2023, merupakan DAU Murni/ SILPA, tetapi terjadi PHK
  - terdapat paket kegiatan DAU murni selesai TA 2021 namun ada tanda bintang
  - terdapat perbedaan yang cukup jauh antara nilai pagu dan nilai kontrak paket kegiatan setelah menerima hasil tender

Solusi yang di lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain adalah :

- Mencari alternatif penganggaran
- Dilakukan reviu APIP dan dianggarkan kembali TA 2024
- Perlu adanya pembatasan nilai kontrak terhadap nilai pagu

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun*, telah dilaksanakan melalui Program Pengembangan Permukiman antara lain:

- 1) *Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi*
  - a. *Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi*
    - (i) *Pengadaan alat penyulingan air laut di Desa Kualin Kab. TTS*
    - (ii) *Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Penfui Timur Kab. Kupang*

#### 3.3.4 SASARAN STRATEGIS 4

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan dalam Tabel III.6 dibawah ini

Tabel III.6  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Nusa Tenggara Timur					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi	84%	96,66%	96,66%	100%	97,78%	97,78%
---	-----	--------	--------	------	--------	--------

Realisasi pencapaian Sasaran 4 : *Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi*, dapat terukur melalui pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan atau menambah jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikasi yang menjadi kewenangan provinsi sesuai amanat Undang-undang Jasa konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.

*Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Tenaga Konstruksi yang Tersertifikasi Ahli Tahun n di bagi Jumlah Tenaga Konstruksi yang mengikuti sertifikasi Tahun n X 100%.*

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi dalam upaya pencapaian indikator ini, setiap tahunnya melakukan kegiatan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi yang bersertifikasi. Pada Tahun 2022 melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi melaksanakan Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Muda Teknik Bangunan dan Teknik Jalan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 90 orang dan Realisasi pelaksanaannya adalah 96,66% atau sebanyak 87 orang yang dinyatakan lulus dan bersertifikasi.

Sedangkan di Tahun 2023 target Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi adalah sebanyak 90 peserta. Kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dengan **realisasi capaian sebesar 88 peserta atau 97,78%.**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa Kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Sumber Daya Air Muda (Jenjang 7) Provinsi NTT yaitu pada Tgl. 1 s/d 7 Agustus 2023 dan Tgl. 28 Agustus s/d 1 September 2023 dengan jumlah peserta keseluruhan 90 peserta dan peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 86 peserta dan 2 peserta dinyatakan tidak lulus.

Permasalahan yang dihadapi adalah oleh karena keterbatasan anggaran maka Pemerintah melakukan upaya kerjasama dan sharing cost pelaksanaan kegiatan dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kementrian Pekerjaan Umum dan Lembaga Asosiasi Profesi yang bergerak dalam pengembangan keahlian jasa konstruksi.

Solusinya adalah Sangat diharapkan agar ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya dapat tersedia secara memadai.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator antara lain:

1. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja KONstruksi Sumber Daya Air Muda (Jenjang 7) Provinsi NTT, Peserta 40, Lulus 38, TL 2 org, Tgl: 1 - 7 Agustus 2023
2. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja KONstruksi Sumber Daya Air Muda (Jenjang 7) Provinsi NTT, Peserta 50, Lulus 50, Tgl: 28 Agustus 2023 - 1 September 2023

### 3.3.5 SASARAN STRATEGIS 5

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 5 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, digambarkan dalam Tabel III.7

Tabel III.7  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	42,2 % 19 PERDA	126,31 % 24 PERDA	77,78 % 35 PERDA	100% 23 Wilayah (Prov/Kab/ Kota)	100% 23 Dokumen	100% 23 Dokumen

Realisasi pencapaian Sasaran 5 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, dengan Indikator Peningkatan Presentase Wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RTRW/RUTR dan RDTR. Terhadap Indikator ini perlu disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda;
- Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima

---

---

tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.

- Saat ini semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten/Kota dan rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.
- Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 – 2023, sebanyak 7 Kabupaten telah sampai pada Penetapan Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Ende dan Lembata.

Sedangkan terhadap Perda RTRW Provinsi yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap revisi kami informasikan beberapa catatan sebagai berikut :

- Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030 sehingga jumlah Perda RTRW Provinsi NTT berjumlah 1 Perda;
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Peninjauan Kembali Perda No.1 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi NTT pada tahun 2016 dan menghasilkan Rekomendasi untuk Revisi dengan Pencabutan;
- Proses Revisi Perda RTRW Provinsi NTT telah dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan dari penyusunan materi teknis hingga proses legalisasi menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) baru (sedang dilaksanakan saat ini);
- Proses legalisasi Perda Revisi RTRW Provinsi NTT telah sampai pada Pembahasan Lintas Sektor di tingkat Kementrian Lembaga yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023, selanjutnya menunggu Persetujuan Substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk proses Penetapan Peraturan Daerah.

Dari beberapa catatan diatas dapat disampaikan bahwa sudah terdapat 23 Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian Indikator Peningkatan Presentase Wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki dokumen Perda RTRW/RUTR adalah  $23 / 23 \times 100 = 100 \%$ .

Masalah yang di hadapi antara lain :

- 1) Masih terdapat beberapa catatan penting terkait penyesuaian terhadap dokumen-dokumen
- 2) Perubahan regulasi yg kemudian mengharus adanya penyesuaian secara terus menerus;

- 
- 
- 3) Adanya kebijakan Sektoral yang juga terus berubah sesuai kepentingan masing-masing sektor sehingga berpengaruh terhadap penetapan kebijakan penataan ruang.
  - 4) Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal dalam proses Penyusunan RTRW.

Solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Dukungan dana untuk pencapaian target.
- 2) Melakukan Percepatan Integritas RZWP3K dan RTRWP.
- 3) Tetap bersurat dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan data-data terbaru guna penyempurnaan penyusunan RTRW.
- 4) Perlu menjalin kerja sama yang intens dengan OPD terkait dan menyesuaikan dengan SOP yang berlaku pada instansi masing-masing mengingat integrasi penyusunan RTRW antara Ruang Darat dan Ruang Laut baru pertama.

### **3.4 REALISASI ANGGARAN**

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tahun 2023 melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 233.457.555.317 ,- Pagu anggaran ini termuat DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2023.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 maka Realisasi seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2023 ini dianggarkan sebesar Rp. 233.457.555.317,- terdiri dari :

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| I. Pagu Anggaran        |                         |
| Belanja Operasi sebesar | : Rp. 56.925.105.221,-  |
| Belanja Modal sebesar   | : Rp. 176.532.450.096,- |
| II. Realisasi Anggaran  |                         |
| Belanja Operasi sebesar | : Rp. 49.005.812.626,-  |
| Belanja Modal sebesar   | : Rp. 151.672.164.040,- |
| III. Sisa Anggaran      |                         |
| Belanja Operasi sebesar | : Rp. 7.919.292.595,-   |
| Belanja Modal sebesar   | : Rp. 24.860.286.059,-  |

Dari seluruh pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 terdapat sisa Anggaran oleh karena masih

terdapat sisa kegiatan yang menjadi kegiatan luncuran di Tahun 2024 dan paket kegiatan yang mengalami kendala dalam penyelesaian paket pekerjaan dan harus dihentikan (PHK).

Uraian realisasi Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT diwujudkan dalam bentuk Program/Kegiatan sbb:

Tabel III.8

**REALISASI BELANJA MODAL**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PRESENTASE (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,672,000.000	2,137,038,00	58,20
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13,310,616,860.000	7,779,009,906,00	58,44
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8,028,044,044.000	4,940,223,850,00	61,54
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	153,405,817,292.000	137,319,368,682,00	89,51
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,784,299,900.000	1,631,424,564,00	91,43
<b>TOTAL</b>		176.532.450.096,00	151.672.164.040,00	85,92

**3.2 ANALISA EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA)  
YANG TELAH DITETAPKAN**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua (2) yaitu **Efisiensi Sumber Daya Biaya** dan **Sumber Daya Manusia**.

Perhitungan efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:



---

---

$$\text{Presentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Real Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

$$\begin{aligned} &= 100\% - \frac{151.672.164.140,00,-}{176.532.450.096,00} \times 100\% \\ &= 85,92\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan sesuai rumus efisiensi diatas, diperoleh presentase efisiensi biaya yang merupakan sisa anggaran dari total Belanja Modal pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebesar **Rp. 24.860.285.956 atau sama dengan 14,08%.**

Tingkat efisiensi pemanfaatan biaya sangat tergantung pada realisasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fisik dilapangan serta pembiayaan lain yang menjadi unsur pendukung pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dan pelaporan kinerja dinas.

---

---

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

- a. Dasar Hukum
  - a) SP DIPA No.033.06.04.249290/2023, tanggal 30 Nopember 2022
  - b) SP DIPA No.003.04.4.249016/2023, tanggal 24 November 2023
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - c) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
  - d) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;

#### **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi**

##### **Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sumber Anggaran dari APBN dana Tugas Pembantuan, dengan jumlah anggaran :

- a) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.158.694.000,-
- b) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.901.649.000,-

#### **3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

##### **3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi**

###### **3.1.1 Target Kinerja**

Target Kinerja dari Program/ Kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/ lembar penugasan (DIPA) adalah :

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air  
Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.158.694.000,- realisasi Rp. 22.157.064.000,- atau sebesar 99.99 % dan fisik 100 % dengan Kegiatan :

- 
- 
- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 21.003.572.000,-
  - Layanan Dukungan Manajemen Internal, target 1 layanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.155.122.000,-
- b) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.901.649.000,- dengan rincian output kegiatan :
- Dukungan Teknis dengan target 100% dan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
  - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dengan target 64.35 Km dan anggaran sebesar Rp. 7.523.679.000,-
  - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) dengan target 858.7 Km dan anggaran sebesar Rp. 444.300.000,-
  - Layanan Dukungan Manajemen Unit Kerja dengan target 1 Tahun/Layanan dan anggaran sebesar Rp. 783.670.000,-

### 3.1.2 Realisasi

1. Realisasi dalam Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (*lihat pada Matriks*)
2. Rincian Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

#### 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.158.694.000,- realisasi Rp. 22.157.064.000,- atau sebesar 99.99 % dan fisik 100 % dengan Kegiatan :

- 1.1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana, dengan rincian:

*OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air:*

- Operasi Rutin D.I. Manikin (31.73 Km) Kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
- Operasi Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS
- Operasi Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
- Operasi Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu

- 
- 
- Operasi Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
  - Operasi Rutin D.I. Benlelang (12.32 Km) di Kab. Alor
  - Operasi Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
  - Operasi Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
  - Operasi Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
  - Operasi Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
  - Operasi Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada
  - Operasi Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur
  - Operasi Rutin D.I. Wae Musur (15.55) di Kab. Manggarai Timur
  - Operasi Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
  - Operasi Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
  - Operasi Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat
  - Operasi Rutin D.I. Nggorang (Mese,Dongkong, Galung) (95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Manikin di (0.171 Km) Kab. Kupang
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Tilong (0.421 Km) di Kab. Kupang
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Batu Merah (0.204 Km) di Kab. Kupang
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Bena (0.338 Km) di Kab. TTS
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haekto (0.346 Km) di Kab. TTU
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mena (0.348 km) di Kab. TTU
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haikesak (0.433 Km) di Kab. Belu
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Malaka (0.517 Km) di Kab. Malaka
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Benlelang (0.329 Km) di Kab. Alor

- 
- 
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Baing (0.329 Km) di Kab. Sumba Timur
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Magepanda (0.371 Km) di Kab. Sikka
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mautenda (0.371 km) di Kab. Ende
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mbay (0.329 Km) di Kab. Nagekeo
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Ngada/Soa (0.288 Km) di Kab. Ngada
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (0.171 Km) di Kab. MATIM
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waemusur (0.271 Km) di Kab. MATIM
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Dingin (0.288 Km) di Kab. Manggarai Timur
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Mantar (0.321 Km) di Kab. Manggarai
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor (0.371 Km) di Kab. Manggarai Barat
  - Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Nggorang (0.354 Km) di Kab. Manggarai Barat
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Manikin (31.73 km) di Kab. Kupang
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Benlelang (12.32 Km) di Kab. Alor
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende

- 
- 
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. MATIM
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Waemusur (15.55 Km) di Kab. MATIM
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat
  - Pemeliharaan Rutin D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung - 95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat

## 1.2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- Administrasi Umum
- Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) ;Kota Kupang;NTT; 1 layanan
- Sistem Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan berbasis Aplikasi SMOPI;Kota Kupang;NTT;1 Layanan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kota Kupang, 1 Layanan

## 2) Program Penyelenggaraan Jalan.

### 1.1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.901.649.000,- realisasi Rp. 8.897.271.000,- atau sebesar 99.95 % dan fisik 100 %, dengan rincian kegiatan: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan rincian:

#### 1.1.1. Dukungan Teknis

Monitoring dan Evaluasi (AU) 1 Dokumen

#### 1.1.2. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), dengan rincian:

- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok - Tenau (14,5 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (6,11 Km)

- 
- 
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (0,34 Km)
  - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (1.04 Km)
  - Penanganan saluran Draenase pada ruas Jalan Pahlawan depan Jembatan Timbang (0.23 Km)
  - Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (11.39 Km)
  - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (9.97 Km)
  - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (4.07 Km)
  - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (0.06 Km)
  - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau (0.18 Km)

1.1.3. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dengan rincian:

- Pemeliharaan rutin Jembatan dalam Kota Kuyupang dan Bolok-Tenau (444.3 M)

1.1.4. Layanan Dukungan Manajemen Unit Kerja

- Eksploitasi Operasional Kantor
- Perjalanan Dinas
- Percepatan Penanganan Covid 19
- Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori I (jumlah paket 1-10)
- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
- Honorarium Penganggung jawab Keuangan
- Eksploitasi Operasional Kantor

---

### **1.1 Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten /Kota** *(diisi oleh Kabupaten/Kota)*

### **1.2 Permasalahan dan Kendala**

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kegiatan Tugas Pembantuan beberapa kendala yang dialami adalah :

1. Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga pada saat koordinasi/ konsultasi/ sinkronisasi kegiatan TP OP Jaringan Irigasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/ lokasi kegiatan membutuhkan waktu dan biaya perjalanan yang besar.
2. Adanya keterlambatan SK sehingga kegiatan TP OP Jaringan Irigasi menjadi terhambat..
3. Untuk TP Bina Marga, adanya pengembalian anggaran oleh karena anggaran terkontrak lebih kecil dari Pagu serta dalam pertengahan pelaksanaan Program/Kegiatan terdapat kegiatan yang perlu penanganan segera yakni drainase pada jembatan timbang oleh karena existing drainase terlalu kecil menyebabkan air mengalir ke jembatan timbang
4. Kesadaran masyarakat masih rendah dengan membuang sampah pada saluran drainase yang dibangun

### **1.3 Saran dan Tindak Lanjut**

1. Koordinasi/ konsultasi/ sinkronisasi kegiatan TP OP Jaringan Irigasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten / lokasi kegiatan dilakukan secepatnya sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan .
2. Koordinasi dengan Petugas OP di lapangan sehingga kegiatan Operasi Rutin dan Pemeliharaan Rutin tetap dilaksanakan di masing-masing lokasi..
3. Tindak lanjut dari masalah adalah terus membangun koordinasi baik dengan Balai dan Pusat serta lurah dan masyarakat setempat
4. Kontrol terus dilakukan pada saat pelaksanaan fisik dilapangan dengan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan juga aparat TNI/POLRI dalam membantu pengamanan saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan.



---

---

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat untuk tingkat Provinsi mengacu kepada sasaran, indikator dan batas waktu pencapaian sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dinas PUPR Provinsi NTT sebagai salah satu Dinas Pengampu SPM meliputi wajib SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat wajib menyampaikan Laporan Capaian Indikator/ Jenis Layanan Penerapan SPM sebagai berikut :

#### **A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah *Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota*, dengan indikator :

- ***Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota***

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

- ***Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota***

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

## 2. Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

### Target dan Indikator Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Cipta Karya & BLUD SPAM	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun

*Sumber data : Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 & Permendagri 100 Tahun 2018*

## 3. Realisasi SPM Pekerjaan Umum

### Realisasi Pencapaian SPM Dinas PUPR Provinsi NTT

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Realisasi	Ket.
1	Cipta Karya & BLUD SPAM	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas	12,71%	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018

		kota	kabupaten/ kota		tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100%	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sumber data : Data BLUD SPAM NTT & Permendagri 100 Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

#### 1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Penanganan *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTT sesuai dengan Pembagian Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi Kewenangan Provinsi. Pada Dinas PUPR Provinsi NTT terdapat bidang Cipta Karya dan salah satu unit yang melekat pada Dinas PUPR yakni Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) NTT yang menjalankan tugas dan fungsi yang sama dalam upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Bidang Cipta Karya**

Pada Tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota. Tahun ini Dinas PUPR Provinsi NTT melalui Bidang Cipta Karya hanya melanjutkan pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Regional di beberapa kabupaten yang pendanaannya

---

---

melalui pinjaman daerah melalui PT. SMI dan dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak (Tahun 2021-2022). Berikut rincian 5 paket Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional yang dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak :

1. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Tengah, Kecamatan Umbu Ratu Ngay, Padiratana dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.400.000.000,-.
2. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Barat, Kecamatan Wanokaka, Desa Bolikoku dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
3. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu (perencanaan 2020) dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.800.000.000,-. (luncuran)
4. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Waikabubak, Desa Soba Rade (perencanaan 2020) dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.700.000.000,-. (luncuran)
5. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, Desa Dikira (perencanaan 2020) dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.700.000.000,-.

Sebagai bahan informasi, realisasi terhadap pelaksanaan kegiatan diatas, capaiannya di Tahun 2021 tidak dapat terhitung oleh karena dilakukan dengan mekanisme tahun jamak, sehingga capaiannya dihitung menjadi capaian SPM pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* di Tahun 2022.

---

---

Dalam proses pelaksanaannya, ada 3 paket yang selesai dikerjakan dan 2 paket yang belum selesai dikerjakan (luncuran) sehingga capaian pada Tahun ini tidak mencapai 100% dari target realisasi pada Tahun 2022.

Pencapaian pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* pada Tahun 2022 berdasarkan Data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh Bidang Cipta Karya adalah :

Formula Pengukurannya :

$$\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/ kota}}{\sum \text{Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Pengukuran ini didasarkan pada data Pelayanan Air Minum Curah yang diintervensi oleh Dinas PUPR Provinsi NTT melalui Bidang Cipta Karya.

*Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota* adalah sebanyak 1.622 SR dan *jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota* adalah sebanyak 2.350 SR.

Presentase yang dapat terlayani pada Tahun 2022 diperoleh dari '*kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota* pada Tahun 2022 dibagi dengan *demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi dikali 100%* , sehingga Pencapaian SPM Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2022 adalah :

$$\frac{1.622}{2.350} \times 100 \% = 69,02 \%$$

*Sumber Data : Data Bidang Cipta Karya*

---

- **BLUD SPAM Provinsi NTT**

Selain Bidang Cipta Karya, ada juga BLUD SPAM Provinsi NTT yang juga melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya.

Pada Tahun Anggaran 2022 BLUD SPAM Provinsi NTT melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota sebanyak 872 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 17.280 SR.

Untuk Wilayah Kabupaten Kupang yang terlayani adalah daerah sekitaran Matani PDAM Kabupaten Kupang dan untuk Wilayah Kota Kupang yang terlayani adalah PDAM Kota Kupang, PT. Angkasa Pura, Undana, Politeknik, Politani dan Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Lama.

*Sebagai gambaran, pencapaian indikator ini pada Tahun 2021 berdasarkan Data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUD SPAM Provinsi NTT adalah :*

$$\frac{329}{20.736} \times 100 \% = 1,90 \%$$

Formula Pengukurannya :

$$\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/ kota}}{\sum \text{Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Pengukuran ini didasarkan pada data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUD SPAM Provinsi.

---

---

*Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 872 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 17.280 SR.*

Presentase yang dapat terlayani pada Tahun 2022 diperoleh dari ‘kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada Tahun 2022 dibagi dengan demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi dikali 100% , sehingga Pencapaian SPM Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2022 adalah :

$$\frac{872}{17.280} \times 100 \% = 5,05 \%$$

*Sumber Data : Data BLUD SPAM NTT*

- **Capaian Pelayanan Dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota**

- a. Bidang Cipta Karya

SR yang harusnya terlayani : 2.350

SR terlayani : 1.622

- b. BLUD SPAM Provinsi NTT

SR yang harusnya terlayani : 17.280

SR terlayani : 872

Dari jumlah capaian diatas dapat dihitung capaian SPM untuk *Pelayanan Dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota* adalah :

$$\Sigma \frac{\text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/ kota}}{\text{Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Pengukuran ini didasarkan pada data Pelayanan Air Minum Curah yang diintervensi oleh Dinas PUPR Provinsi NTT melalui Bidang Cipta Karya dan BLUD SPAM.

*Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 2.494 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 19.630 SR.*

Presentase yang dapat terlayani pada Tahun 2022 diperoleh dari ‘kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada Tahun 2022 dibagi dengan demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi dikali 100% , sehingga Pencapaian SPM Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2022 adalah :

$$\frac{2.494}{19.360} \times 100 \% = 12,71 \%$$

**19.360**

*Sumber Data : Akumulasi Data Bidang Cipta Karya dan BLUD SPAM NTT*

Dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota sebanyak 2.494 SR dengan perkiraan 1 SR = 6 jiwa, maka dapat dihitung jumlah jiwa yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2022 adalah :

$$2.494 \times 5 = 12.470 \text{ jiwa}$$

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota



---

---

Pada Tahun Anggaran 2022, belum tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* sehingga capaiannya tidak dapat terhitung. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

#### 4. Alokasi Anggaran

- Bidang Cipta Karya

Pada Tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota. Tahun ini Dinas PUPR Provinsi NTT melalui Bidang Cipta Karya hanya melanjutkan pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Regional di beberapa kabupaten yang pendanaannya melalui pinjaman daerah melalui PT. SMI dan dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak (Tahun 2021-2022). Berikut rincian 5 paket Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional yang dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak :

1. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Tengah, Kecamatan Umbu Ratu Ngay, Padiratana dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.400.000.000,-.
2. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Barat, Kecamatan Wanokaka, Desa Bolikoku dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
3. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu (perencanaan 2020) dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.800.000.000,-. (luncuran)
4. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Waikabubak, Desa Soba Rade (perencanaan 2020) dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.700.000.000,-. (luncuran)

- 
- 
5. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, Desa Dikira (perencanaan 2020) dengan alokasi dana sebesar **Rp. 4.700.000.000,-**.

Realisasi terhadap pelaksanaan kegiatan diatas, capaiannya di Tahun 2021 tidak dapat terhitung oleh karena dilakukan dengan mekanisme tahun jamak, sehingga capaiannya dihitung menjadi capaian SPM pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* di Tahun 2022.

Rincian program/ kegiatan untuk Jenis pelayanan dasar *Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota* sebagai berikut :

- Program Pengembangan Permukiman; Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; Sub Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 70.005.925.108,-**

- **BLUD SPAM Provinsi NTT**

Di Tahun Anggaran 2022 untuk pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota*, BLUD SPAM Provinsi NTT melakukan pelayanan air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya dengan rincian program/ kegiatan untuk Jenis pelayanan dasar *Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota* sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD; Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.084.687.650,-**

## 5. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Dukungan Personil	
				ASN	Non ASN
I	Cipta Karya	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	26	22
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota		

Sumber data : Dinas PUPR Provinsi NTT

Total keseluruhan dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* dan *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* adalah sebanyak 48 orang dengan rincian, ASN sebanyak 26 orang dan 22 orang Non ASN.

---

## 6. Permasalahan dan Solusi

SPM pada dasarnya sudah diimplementasikan sejak lama, namun implementasinya masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai kendala dan permasalahan, baik yang berasal dari pihak internal Dinas Pengampu SPM maupun eksternal masih sering dan selalu terjadi setiap tahunnya.

Dinas PUPR Provinsi NTT sebagai dinas teknis melaksanakan program/ kegiatan sesuai anggaran yang diterima. Dan untuk diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 terjadi 5 kali perubahan anggaran, dimana terdapat beberapa kegiatan yang difokuskan sehingga ada beberapa jenis pelayanan dasar yang pencapaiannya cukup rendah.

Identifikasi berbagai permasalahan disertai solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT pada Tahun 2022 tergambar pada Tabel berikut ini :

**TABEL 5.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Masalah dan Solusi	
				Masalah	Solusi
I	Cipta Karya	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	- Keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan keterbatasan dalam upaya penanganan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kab/Kota	<p>Anggaran yang terbatas akibat refocusing anggaran menyebabkan kegiatan hanya bisa diarahkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia sebagai bagian dari upaya Pemenuhan dan Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota.</p> <p>Mengejar progress pelaksanaan kegiatan , menyesuaikan dengan waktu m yang tersisa.</p>

---

---

	BLUD SPAM Provinsi			-  Belum adanya kerja sama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kota Kupang.  Belum adanya kerja sama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kabupaten Kupang.	  Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kota Kupang pada Bulan Januari 2022 dengan Nomor : 001/JB/BLUD-SPAM/I/2021 dan Nomor : 03/A/PERUMDA-AM/KOTA-KPG/I/2021.  Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kabupaten Kupang pada Bulan November 2021 dengan Nomor : 002/JB/BLUD-SPAM/XI/2021 dan Nomor : PK.11/PDAM/KAB-KPG/XI/2021.
--	-----------------------	--	--	--	--

---

---

		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Dengan Kondisi Fiskal daerah yang ada maka alokasi anggaran untuk kegiatan terkait Pelayanan Dasar <i>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota</i> pada Dinas PUPR Provinsi NTT tidak dapat dianggarkan sehingga tidak terdapat kegiatan <i>Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota</i> di Tahun anggaran 2022.	

Sumber data : Dinas PUPR Provinsi NTT



**TABEL 5.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI IMPLEMENTASI  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

No.	Jenis Masalah	Masalah	Tindak Lanjut/ Solusi
I	Data Dasar	Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang update	Perlu kejelasan tugas dan kewenangan pihak penyedia data
2	Indikator	Tidak semua indikator dalam SPM dapat dihitung/ diterapkan karena karakteristik masing-masing daerah yang berbeda	Adanya kejelasan atau kesepakatan terkait indikator dan formulasi yang sulit diterapkan/ dihitung
3	Penetapan Target SPM	Karakteristik pulau yang berbeda (berbukit-bukit dan curah hujan yang tidak pasti) menyulitkan daerah untuk menetapkan target dan indikator mengacu kepada target nasional	Koordinasi dengan Dinas Pengampu terkait penetapan target riil
4	Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan	Tidak semua indikator dapat dengan mudah diintegrasikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah	Adanya komitmen antara Dinas Pengampu dengan Kepala Daerah





5	Pembinaan dari Kementrian/ Lembaga	Pembinaan belum rutin dan kontinyu	Adanya Sosialisasi terkait Standar Pelayanan Minimal Provinsi maupun Kabupaten/ Kota
---	---------------------------------------	------------------------------------	--

## B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* dengan indikator :

- *Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*
- *Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.*

### 2. Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

#### Indikator dan Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun



2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun
---	--	--	-------	--------------

Sumber Data : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 29/PRT/M/2018 ;

Permendagri No. 100 Tahun 2018

### 3. Realisasi SPM Perumahan Rakyat

#### Realisasi Pencapaian SPM Dinas PUPR Provinsi NTT

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Realisasi	Ket.
I	Perumahan dan Permukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	1 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Belum dapat ditindaklanjuti terkait ketersediaan anggaran
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena	2 Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang	100%	Belum dapat ditindaklanjuti terkait ketersediaan anggaran



		Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
--	--	---	--	--	--

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

Untuk pelayanan dasar terkait *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dengan indikator *Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*, belum dapat ditindaklanjuti terkait kondisi ketersediaan anggaran. Hal ini akan terus menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk penanganan di tahun selanjutnya.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Pada Tahun Anggaran 2022, Capaian terhadap Pemenuhan Indikator ini masih belum dapat dilakukan oleh karena kondisi ketersediaan anggaran.

Di tahun 2023 telah diprogramkan kegiatan penyusunan Site Plan (rencana tapak) dan/atau Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Khusus bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi yang termasuk di dalamnya kegiatan berkaitan dengan Relokasi program Pemerintah Provinsi untuk Kawasan Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penyediaan rumah sesuai kebutuhan Layanan Dasar yang disyaratkan.

#### 4. Alokasi Anggaran

Keterbatasan keuangan daerah sampai dengan saat ini berdampak pada belum tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Dukungan Personil	
				ASN	Non ASN
1	Perumahan dan Permukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	28	15
2		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		



		Daerah Provinsi			
--	--	-----------------	--	--	--

Sumber data : Dinas PUPR Provinsi NTT

Total keseluruhan dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban Bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 43 orang dengan rincian, ASN sebanyak 28 orang dan 15 orang Non ASN.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2022 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebagai berikut :



No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Hambatan dan Solusi	
				Hambatan	Solusi
I	Perumahan dan Permukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Kondisi keterbatasan anggaran dan batasan kewenangan dalam penanganan <i>Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi</i> .	Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun selanjutnya
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Kondisi keterbatasan anggaran dan batasan kewenangan dalam penanganan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Di tahun 2023 telah diprogramkan kegiatan penyusunan Site Plan (rencana tapak) dan/atau Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Khusus bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi yang termasuk di dalamnya kegiatan berkaitan dengan Relokasi program Pemerintah Provinsi untuk Kawasan Besipae

Sumber data : Dinas PUPR Provinsi NTT

Pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan tahun 2022 belum dapat dilakukan secara maksimal karena kondisi keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, semua tahapan yang berkaitan dengan proses pelaporan Standar Pelayanan Minimal, mulai dari tahap Pengumpulan Data sampai dengan tahap Pelaksanaan Penerapan SPM belum dapat dilakukan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ketersediaan anggaran.

Sebagai bahan informasi, di Tahun 2023 telah dianggarkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Site Plan (rencana tapak) dan/atau Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Khusus bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi yang termasuk di dalamnya kegiatan berkaitan dengan Relokasi program Pemerintah Provinsi untuk Kawasan Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Kupang, Januari 2024

KEPALA DINAS,

,

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680326 199703 1 005